

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,**  
**DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi**

**2.1.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang fungsional yang mendasari sistem fungsional lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi lain membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi.

Pengertian sistem informasi akuntansi (SIA) menurut Wing Wahyu Winarno (2006:1.3), yaitu:

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem. Suatu sistem memiliki banyak komponen yang saling berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi (SIA) juga memiliki banyak komponen dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama.

Menurut Azhar Susanto sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan (2013:72), sebagai berikut:

Kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dibuat untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen sebuah perusahaan guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

#### **2.1.1.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan atau menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas serta bermanfaat bagi pihak manajemen khususnya, serta pemakai-pemakai informasi lainnya dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi yang baik dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya, yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. Selain itu dalam suatu sistem informasi akuntansi terdapat unsur fungsi pengendalian sehingga mengurangi terjadinya ketidak relevan atau ketidak pastian penyajian informasi. Oleh karena itu, baik buruknya suatu sistem informasi dapat mempengaruhi fungsi manajemen dalam melakukan pengendalian internal. Karena informasi yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.

Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:8) adalah:

1. Mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan
3. Membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan.

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2009:29) fungsi sistem informasi akuntansi adalah:

1. *Collect and store data about organizational activities, resources and personal.*
2. *Transform data into information that is useful for making decisions so management can plan, execute, control and evaluate activities, resources and personal.*
3. *Provide adequate controls to safeguard the organization's assets, including its data, to ensure that the assets and data are available when needed and the data are accurate and reliable.*

Pernyataan Romney dan Steinbart menyatakan bahwa fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut saat dibutuhkan akurat dan andal.

### **2.1.1.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang saling berinteraksi satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan dalam suatu struktur sistem informasi untuk mencapai sarannya. Komponen sistem informasi akuntansi menurut Wing Wahyu Winarno (2006:2.3), sebagai berikut:

1. **Basis data**, baik basis data internal (berada dibawah kendali perusahaan sepenuhnya) dan basis data eksternal (tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan).
2. **Perangkat keras komputer** dan berbagai perangkat pendukungnya, yang semuanya berfungsi untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi, baik secara *hardcopy* (tercetak) maupun *softcopy* (tidak tercetak).
3. **Perangkat lunak komputer**, yang berfungsi untuk menjalankan komputer beserta perangkat pendukungnya.
4. **Jaringan komunikasi**, baik dengan kabel, gelombang radio, maupun sarana lain, yang berfungsi untuk menghantarkan data dan informasi dari satu tempat ketempat lain.
5. **Dokumen dan laporan** (baik bersifat *hardcopy* maupun *softcopy*), yaitu media untuk mencatat data atau menyajikan laporan.
6. **Prosedur**, atau kumpulan langkah-langkah baku untuk menangani suatu peristiwa (atau transaksi) yang setiap hari terjadi di dalam perusahaan.
7. **Pengendalian**, yang berfungsi untuk menjamin agar setiap komponen sistem dapat berfungsi dengan baik.

Menurut Azhar Susanto (2013:58) komponen sistem informasi dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*Hardware*)
2. Perangkat lunak (*Software*)
3. Manusia (*Brainware*)
4. Prosedur (*Procedure*)
5. Basis data (*Data Base*)
6. Jaringan komunikasi (*Communication Network*).

Penjelasan dari keenam komponen sistem informasi akuntansi diatas dapat di jelaskan berikut ini:

#### 1. *Hardware* (Perangkat Keras)

*Hardware* merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. *Hardware* terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

- a. Bagian input (*Input Device*) merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data ke dalam komputer. Jenis perangkat masukan komputer adalah keyboard, mouse, joystick, scanner, kamera, touch screen.
  - b. Bagian pengolah utama dan memori, terdiri dari prosesor, memori, BUS, *cache memory, motherboard, driver card*.
  - c. Bagian Output (*output device*) merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Peralatan output yang biasa digunakan yaitu printer, layar monitor, *Head Mount Display (HMD)*, LCD (*Liquid Cristal Display Projector*) dan speaker.
  - d. Bagian komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi.
2. *Software* (Perangkat Lunak)

*Software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. *Software* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem (*system software*) dan perangkat lunak aplikasi (*application software*).

a. *System software*

Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi (*operating system*), *interpreter* dan *compiler* (kompiler).

b. *Application software*

Perangkat lunak aplikasi atau sering disebut “paket aplikasi” merupakan *software* jadi yang siap untuk digunakan. *Software* ini dibuat oleh perusahaan perangkat lunak tertentu (*Software House*) baik dari dalam maupun luar negeri yang umumnya berada di Amerika.

3. *Brainware* (Manusia)

*Brainware* atau sumberdaya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen Sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Komponen SDM ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan komponen lainnya didalam suatu SI sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi diantara sumberdaya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi. Beberapa kelompok SDM suatu organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas diatas secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam pemilik dan pemakai sistem informasi.

- a. Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemilik sistem informasi cenderung berfikir sangat general, tidak detail.
- b. Pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai akhir sistem informasi tersebut menentukan:
  - Masalah yang harus dipecahkan
  - Kesempatan yang harus diambil

- Kebutuhan yang harus dipeuhi, dan
  - Batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi.
- Mereka juga cukup memperhatikan tayangan aplikasi di komputer baik dalam bentuk *form input* maupun *outputnya*.

#### 4. Prosedur

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

#### 5. *Database* (Basis Data)

Basis data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang membantu perusahaan agar sumber daya informasi yang dimilikinya mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya.

#### 6 *Communication Network* (Jaringan Komunikasi)

Telekomunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai pengguna media elektronik atau cahaya yang memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi ke suatu atau beberapa lokasi lainnya yang berbeda.

### **2.1.1.4 Dimensi Sistem Informasi Akuntansi**

Dilihat dari kualitasnya maka secara umum informasi akuntansi memiliki empat dimesi kualitas informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:13), yaitu:

1. **Akurat** – dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut benar-benar mencerminkan situasi dan kondisi yang ada
2. **Relevan** – dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan, benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
3. **Tepat waktu** – dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan.
4. **Lengkap** – dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan tersebut telah selengkap yang diinginkan dan dibutuhkan”

Dimensi tersebut dapat diperluas menjadi:

1. Efektif
2. Efisiensi
3. Confidensial
4. Integritas
5. Ketersediaan
6. Kepatuhan
7. Kebenaran informasi

Adapun penjelasan mengenai dimensi sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

1. **Efektif** – berkaitan dengan relevansi suatu informasi dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya harus disajikan dalam waktu yang tepat, akurat, konsisten, dapat digunakan dan lengkap.
2. **Efisiensi** – berkaitan dengan penyajian informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal (produktif dan ekonomis)
3. **Confidensial** – berkaitan dengan proteksi yang diberikan terhadap informasi yang sensitif
4. **Integritas** – berkaitan dengan akurasi, kelengkapan informasi dan validitasnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
5. **Ketersediaan** – berkaitan dengan informasi yang selalu harus tersedia saat diperlukan oleh pemakai
6. **Kepatuhan** – berkaitan dengan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah serta tanggung jawab terhadap pihak eksternal.

7. **Kebenaran informasi** – berkaitan dengan sistem informasi yang menyajikan informasi yang mencerminkan keadaan sesungguhnya.

#### **2.1.1.5 Definisi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi orientasinya ke informasi akuntansi yang berkualitas maka yang diintegrasikan bukan hanya *hardware* saja melalui penggunaan jaringan (*network*) seperti yang dilakukan pada konsep database bersama bank data, serta kumpulan sumber daya untuk merancang data keuangan dalam bentuk informasi.

Menurut George H. Bodnar dan Hopwod yang dialihbahasakan oleh Amir Abdi Yusuf (2006:6) mengenai kualitas sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya yang berkualitas ke dalam informasi, yang nantinya informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan.

Sedangkan menurut DeLone dan McLean 1992 yang dialihbahasakan oleh Istianingsih dan Utami (2009) adalah sebagai berikut:

Kualitas sistem informasi akuntansi berarti fokus pada performa sistem informasi akuntansi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan prosedur yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang terdiri dari kemudahan untuk digunakan (*ease to use*) kemudahan untuk diakses (*flexibility*), keandalan sistem (*reliability*).

Dalam konsep sistem akuntansi yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas.

Selanjutnya menurut Istianingsih (2009) terdapat tahap-tahap dari proses terbentuknya kualitas sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan
2. Kualitas sistem
3. Kualitas informasi

Kualitas sistem informasi akuntansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan
  - a. *Tangibles* (bukti langsung) yaitu fasilitas fisik, kelengkapan dan peralatan, serta sarana komunikasi.
  - b. *Reability* (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan segera, dan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
  - c. *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu sesuai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas.
  - d. *Assurance* (jaminan) yaitu pengetahuan yang luas, kesopanan dari karyawan, dan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan.
  - e. *Empathy* (empati) yaitu suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, yang spesifik serta memiliki waktu yang nyaman bagi pelanggan.

## 2. Kualitas sistem

- a. *System flexibility* (kemudahan untuk diakses) yaitu untuk memberikan kemudahan dalam menampilkan kembali data-data yang diperlukan dan menampilkannya dalam format yang berbeda.
- b. *Response time* (kecepatan akses) yaitu kecepatan pemrosesan, dan waktu respon.
- c. *Security* (keamanan) yaitu keamanan sistem dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi.

## 3. Kualitas informasi

- a. *Content* (isi) yaitu kemampuan sistem dalam menyediakan laporan yang informatif sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, menghasilkan laporan yang tepat, dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. *Accuracy* (keakuratan) yaitu kemampuan sistem informasi akuntansi yang dihasilkan dalam kekurangan informasi.
- c. *Format* (format) yaitu sisi tampilan sistem informasi akuntansi mudah ketika digunakan.
- d. *Ease of use* (kemudahan pemakai) yaitu suatu sistem informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut.
- e. *Timeliness* (ketepatan waktu) yaitu informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi memiliki ketepatan waktu.

### **2.1.1.6 Penilaian Kualitas Sistem Informasi Akuntansi**

Komponen yang penting dalam menciptakan suatu sistem informasi akuntansi yang berkualitas, mengarah kepada semua bentuk keputusan yang membutuhkan informasi dari hasil penelitian yang telah dipertimbangkan secara rasional dan logis serta objektif.

Menurut Tata Sutabri (2005:50) terdapat tiga strategis penilaian dalam sistem informasi akuntansi yaitu:

1. Strategi penilaian masukan, yang bertujuan menilai perencanaan informasi yang disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang nyata.
2. Strategi penilaian proses, yang bertujuan menilai pelaksanaan transformasi informasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penilaian, penyajian, dan penyebarluasan, dokumentasi, dan komunikasi yang secara keseluruhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan.
3. Strategi penilaian sistem, yang bertujuan menilai sistem-sistem yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi.

Dengan demikian, penilaian menjadi satu bagian yang penting dalam pengolahan sistem informasi akuntansi, tidak disamakan dengan pemeberian angka terhadap hasil kegiatan di bidang informasi. Penilaian mengandung makna yang sangat luas dan sangat penting dalam menciptakan kualitas sistem informasi akuntansi.

## **2.1.2 Pengendalian Internal Berbasis COSO**

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian intern, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian intern dalam perusahaan tersebut. guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengendalian internal, maka penulis secara berurutan akan mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal tersebut.

### **2.1.2.1 Definisi Pengendalian Internal Berbasis COSO**

Secara umum pengendalian merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) sebagai suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Pada tahun 1992, COSO yang didirikan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut telah menerbitkan *Internal Control Framework* yang didalamnya disusun definisi umum untuk pengendalian internal, standar, dan kriteria pengendalian internal yang dapat digunakan perusahaan menilai sistem pengendalian mereka.

Pada tanggal 14 Mei 2013, COSO menerbitkan *Internal Control Integrated Framework* (ICIF) sebagai revisi dari versi tahun 1992. Revisi

kerangka kerja pengendalian internal ini di setiap organisasi, walaupun penyesuaian lebih lanjut diperlukan untuk menyelaraskan pengendalian internal di seluruh dunia dan untuk membantu organisasi mengelola risiko secara lebih baik dan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada edisi terbaru ini, COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

*Internal control is a process, effected by an entity's boar of directors, manage-ment,and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.*

Memperhatikan pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian internal dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilan tergantung pada kompetensi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Sedangkan pengendalian inter menurut *The American Institute of Certified Public Accountans* (AICPA) yang dialih bahasakan oleh Wing Wahyu Winarno (2006:11.4), yaitu:

Rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Menurut Azhar Susanto (2013:95) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah sebagai berikut:

Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian pengendalian internal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, pengendalian internal bukan merupakan suatu tujuan, melainkan suatu proses untuk pencapaian tujuan, yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, ketaatan, efektivitas, dan efisiensi operasi entitas. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam dari pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal**

COSO (2013:3) dalam *framework* terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internl sebagai berikut:

*The Framework provides for three categories of objectived, which allow organizations to focus on differing aspects of internal control:*

1. *Operations objectives—These pertain to effectiveness and efficiency of the entity's operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*
2. *Reporting Objectives—These pertain to internal and external financial and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized standard setters, or the entity's policies.*
3. *Compliance Objective—These pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject.*

Berdasarkan konsep COSO, bahwa pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan.

Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga aset dari kerugian. Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuatan-pembuatan standar yang diakui, ataupun kebijakan-kebijakan entitas. Sementara itu, tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan nama entitas merupakan subjeknya.

Tujuan-tujuan pengendalian internal dalam versi ICIF COSO tahun 2013 ini pada dasarnya relatif sama dengan yang dikemukakan pada tahun 1992, namun tujuan-tujuan tersebut mengalami perluasan, misalnya pada tujuan-tujuan operasi yang tidak hanya mencakup kinerja keuangan dan pengamanan aset saja, tetapi juga operasi perusahaan atau entitas secara keseluruhan.

Sebagai perbandingan, tujuan-tujuan pengendalian internal yang dirumuskan oleh Arens, Elder, dan Beasley dalam Hermawan (2008:370) tujuan pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Realibilitas pelaporan keuangan.
2. Efisiensi dan efektifitas operasi.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan.

Bedasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa tujuan pengendalian internal yang mencakup 3(tiga) hal pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.
3. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkat, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil (*output*) dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian internal tercapai, maka perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal.

### **2.1.2.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal**

Menurut COSO (2013:4) dalam *Internal Control-Integrated Framework (ICIF)* komponen pengendalian internal sebagai berikut :

*Internal control consists of five integrated components:*

1. *Control Environment*
2. *Risk Assessment*
3. *Control Activities*
4. *Information and Communication*
5. *Monitoring Activities.*

Adapun hubungan di antara kelima tujuan dan komponen-komponen pengendalian internal tersebut digambarkan oleh COSO (2013:5) dalam bentuk kubus sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Relationship of Objectives and Components of Internal Control**

Sumber: COSO(2013:5)

Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa ada suatu hubungan langsung antara tujuan-tujuan sebagai apa yang hendak dicapai entitas dengan komponen-komponen pengendalian internal yang mewakili apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu, serta struktur organisasi entitas pada setiap tingkatan (divisi, unit operasi, fungsi, dan lainnya). Ketiga kategori tujuan tersebut (operasi, pelaporan, dan ketaatan) diwakili oleh kolom, kemudian kelima komponen pengendalian internal diwakili oleh baris, sedangkan struktur organisasi entitas direpresentasikan oleh ketiga dimensinya. Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima komponen pengendalian internal tersebut:

### **1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)**

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang

pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

COSO (2013:4) menjelaskan mengenai komponen lingkungan pengendalian (*Control Environment*) sebagai berikut:

*The control environment is the set of standards, processes, and structures that provide the basis for carrying out internal across the organization. The board of directors and senior management establish the tone at the top regarding the importance of internal control including expected standards of conduct. Management reinforces expectations at the various levels of the organization. The control environment comprises the integrity and ethical values of the organization: the parameters enabling the board of directors to carry out its governance oversight responsibility; the process for attracting, developing, and retaining competent individuals; and the rigor around performance measures, incentives, and rewards to drive accountability for performance. The resulting control environment has a pervasive impact on the overall system of internal control.*

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

Lingkungan pengendalian terdiri dari:

1. Integritas dan nilai etika organisasi;
2. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya;
3. Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab;
4. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; dan
5. Ketegasan mengenai tolak ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal. Selanjutnya, COSO (2013:7) menyatakan, bahwa terdapat 5(lima) prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian, yaitu:

1. *The organization<sup>1</sup>demonstrates a commitment to integrity and ethical values.*
2. *The boards of directors demonstrates independence from management and of exercises oversight the development and performance of internal control.*
3. *Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, and appropriate authorites and responsibilites in the pursuit of objectives.*
4. *The organization demonstrates a commitment to attract, develop, an retain competent individuals in alignment with objectives.*
5. *The organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities in the pursuit of objectives.*

Memperhatikan rumusan COSO di atas, maka lingkungan pengendalian dapat terwujud dengan baik apabila diterapkan 5(lima) prinsip dalam pelaksanaan pengendalian internal, yaitu :

1. Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
2. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
3. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur-jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam managejar tujuan.

---

<sup>1</sup>*For purpose of the Framework, the term “organization” is used to collectively capture the board, management, and other personnel, as reflected in the definition of internal control.*

4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan.
5. Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas organisasi menurut Arens dan Loebbecke sebagaimana diterjemahkan oleh Jusuf (2003:261-263) terdiri dari tujuh faktor sebagai berikut:

1. Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek. Ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensif dan godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis.
2. Komitmen terhadap kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas, meliputi: pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diisyaratkan.
3. Falsafah manajemen dan gaya operasi merupakan sifat dari suatu manajemen, apakah bersifat pengambilan risiko atau penghindar risiko, yang membuat auditor dapat merasakan sikap mereka terhadap pengendalian.
4. Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggungjawab dan wewenang yang ada. Ini biasanya juga menghubungkan garis arus komunikasi.
5. Dewan komisaris dan komite audit yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggota aktif dan menilai aktivitas manajemen.
6. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, merupakan suatu metode komunikasi formal yang mungkin mencakup cara-cara seperti memo dari manajemen tentang pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas pegawai, dan dokumen kebijakan yang menggambarkan perilaku pegawai seperti perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal.
7. Kebijakan dan prosedur kepegawaian yang menyangkut sistem pengelolaan kepegawaian untuk menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang efektif, metode bagaimana mereka direkrut, dievaluasi dan digaji.

## 2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

COSO (2013:4) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiko (*risk assesment*) sebagai berikut:

*Risk is defined as the possibility that event will occur and adversely affect the achievement of objectives. Risk assesment involves a dynamic and iterative process for identifying and assessing risk to the achievement of objectives, risks to the achievement of these objectives from acrouss the entity are considered relative to established risk tolerances. Thus, risk assessment from the basis for determining how risks will be managed. A precondition to risk assessment is the establishment of objectives, linked at different levels of the entity. Management specifies objectives within categories relating to operations, reporting, and compliance with sufficient clarity to be able to identify and analyze risks to those objectives. Management also considers the suitability of the objectives for the entity. Risk assessment also requires management to consider the impact of possible changes in the external environment and within its own business model that may render internal control ineffective.*

Berdasarkan rumusan COSO , bahwa penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengindetifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaia tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas di anggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian resiko harus dikelola oleh organisasi.

Arens dan Randal yang diterjemahkan oleh Hermawan (2008:379) menyatakan bahwa penilaian risiko adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengindentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

Selanjutnya, COSO (2013:7) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko sebagai berikut:

1. *The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the identification and assessment of risk relating to objectives.*
2. *The organization identifies risk to the achievement of its objectives across the entity and analyzes risk as a basis for determining how the risks should be managed.*
3. *The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the achievement of objectives.*
4. *The organization identifies and assesses changes that could significantly impact the system of internal control.*

Berdasarkan rumusan COSO diatas, bahwa ada 4 (empat) prinsip yang mendukung penilaian resiko dalam organisasi yaitu:

1. Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola
3. Organisasi mempertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, Amin Widjaja (2013:18) menyebutkan bahwa penilaian risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

1. Perubahan dalam lingkungan operasi.
2. Personil yang baru.
3. Sistem informasi yang baru atau berubah.
4. Pertumbuhan yang cepat.
5. Teknologi baru.
6. Lini, produk, atau aktivitas yang baru.

7. Restrukturisasi korporat.
8. Operasi luar negeri.
9. Pengumuman/pernyataan akuntansi.

Mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi yang baru atau prinsip-prinsip akuntansi yang berubah dapat mempengaruhi risiko yang tersangkut dalam penyiapan laporan keuangan.

### **3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)**

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (*control activities*) sebagai berikut :

*Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that management's directives to mitigate risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages within business processes, and over the technology environment. They may be preventive or detective in nature and may encompass a range of manual and automated activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations, and business performance reviews. Segregation of duties is typically built into the selection and development of control activities. Where segregation of duties is not practical, management selects and develops alternative control activities.*

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Arens, Elder, dan Beasley yang dialih bahasakan oleh Hermawan (2008:380) menyebutkan sebagai berikut:

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas.

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, presentasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. COSO (2013:7) menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu sebagai berikut:

- 1. The organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels.*
- 2. The organization selects and develops general control activities over technology to support the achievement of objectives.*
- 3. The organization deploys control activities through policies that establish what is expected and procedures that put policies into action.*

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3(tiga) prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian dalam organisasi yaitu:

1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima.
2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
3. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

Menurut Azhar Susanto (2013:99) jenis pengendalian aktivitas diantaranya yaitu:

1. Prosedur otorisasi
2. Mengamankan aset dan catatannya
3. Pemisahan fungsi
4. Catatan dan dokumentasi yang memadai.

Jenis pengendalian aktivitas diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prosedur otorisasi

Prosedur ini dibuat untuk memberikan otorisasi (kewenangan) kepada karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi. Prosedur otorisasi sangat tergantung kepada otorisasi apa yang akan dilakukan. Ada dua macam otorisasi yang diberikan oleh manajemen, yaitu:

- Otorisasi umum, berkaitan dengan transaksi secara keseluruhan. Otorisasi umum menggambarkan kondisi dimana karyawan mengawasi, mencatat, memproses satu jenis transaksi. Ketika kondisi tertentu terpenuhi karyawan diberi otorisasi (wewenang) untuk melakukan transaksi tanpa terlebih dahulu harus berkonsultasi.
- Otorisasi khusus, diterapkan hanya kepada jenis transaksi tertentu. Manajemen umumnya memerlukan otorisasi khusus untuk transaksi yang jumlahnya besar atau transaksi yang berpotensi menimbulkan penyelewengan. Sebelum karyawan mengawasi transaksi tertentu yang telah ditentukan, karyawan harus berkonsultasi dulu kepada manajemen untuk memperoleh persetujuan melakukan transaksi.

## 2. Mengamankan aset dan catatannya

Pengamanan aset dan catatannya ini meliputi keamanan fisik dan kepastian tanggung jawab.

- Keamanan fisik

Menerapkan prosedur tertentu untuk memberikan keamanan secara fisik pada persediaan, uang tunai, tanah, gedung-gedung, peralatan, dan catatan yang berkaitan dengan aset.

- Kepastian tanggung jawab

Manajemen memberi tanggung jawab untuk melindungi aset dan data tertentu kepada karyawan. Jika terjadi suatu penyimpangan manajemen akan meminta karyawan tersebut untuk bertanggung jawab.

## 3. Pemisahan fungsi

Manajemen dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan harus menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dan kepada orang lain. Pemisahan ini akan mengurangi kesempatan kepada karyawan untuk melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan selama melaksanakan tugasnya. Tugas yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk otorisasi melakukan transaksi, mencatat transaksi, dan memelihara posisi aset.

#### 4. Catatan dan dokumentasi yang memadai

Manajemen harus mengharuskan penggunaan dokumen dan catatan akuntansi untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi akuntansi yang terjadi telah dicatat dengan tepat.

#### **4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)**

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) dalam pengendalian internal sebagai berikut:

*Information is necessary for the entity to carry out internal control responsibilities to support the achievement of its objectives. Management obtains or generates and uses relevant and quality information from both internal and external sources to support the functioning of other components of internal control. Communication is the continual, interactive process of providing, sharing, and obtaining necessary information. Internal communication is the means by which information is disseminated throughout the organization, flowing up, down, and across the entity. It enables personnel to receive a clear message from senior management that control responsibilities must be taken seriously. External communication is twofold: it enables inbound communication of relevant external information, and it provides information to external parties in response to requirements and expectations.*

Sebagaimana yang dinyatakan oleh COSO di atas, bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan

berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

COSO (2013:7) selanjutnya menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu sebagai berikut:

- 1. The organization obtains or generates and uses relevant, quality information to support the functioning of internal control.*
- 2. The organization internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning of internal control.*
- 3. The organization communicates with external parties regarding matters affecting the functioning of internal control.*

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3(tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu:

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

Khusus berkenaan dengan informasi akuntansi, menurut arens dan loebbecke yang diadaptasi oleh jusuf (2003:127), indikator-indikator dari informasi dan komunikasi terdiri dari:

1. Eksistensi, yang menunjukkan apakah angka-angka yang dimasukkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan.
2. Kelengkapan, merupakan angka-angka transaksi yang seharusnya dimasukkan dan diikuti sertakan secara lengkap serta mempertimbangkan materialitas dan biaya.
3. Akurasi, yakni mengacu kepada jumlah yang dimasukkan dengan jumlah yang benar.
4. Klasifikasi, bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurna telah diklasifikasikan dengan tepat.
5. Tepat waktu, dimana pencatatan transaksi dicatat pada tanggal yang tepat.
6. *Posting*, pengikhtisaran, di mana transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar.

### **5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)**

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai aktivitas pemantauan (*monitoring activities*) dalam pengendalian internal sebagai berikut:

*Ongoing evaluations, separate evaluations, or same combination of the two are used to ascertain whether each of the five components of internal control, including controls to effect the principles within each components, is present and functioning. Ongoing evaluations, built into business processes at different levels of the entity, provide timely information. Separate evaluations, conducted periodically, will vary in scope and frequency depending on assessment of risks, effectiveness of ongoing evaluations, and other management considerations. Findings are evaluated against criteria established by regulators, recognized standards-setting bodies or management and the board of directors as appropriate.*

Memperhatikan rumusan yang dikemukakan oleh COSO di atas, bahwa aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan

dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

Menurut Arens dan Loebbecke sebagaimana diadaptasi oleh Jusuf (2003:54) menyebutkan bahwa, aktivitas pemantauan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Frekuensi penilaian aktivitas, merupakan tingkat keseringan dari kegiatan penilaian aktivitas.
2. Fungsi internal audit, yakni efektif atau tidaknya fungsi dari internal audit yang ditandai dengan adanya dukungan kompetensi, integritas dan objektivitas.
3. Saran dari akuntan, dimana tanggung jawab untuk menentukan kebijakan akuntansi yang sehat dan terlaksananya struktur pengendalian intern dengan baik serta tersajinya laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen bukannya auditor. Namun demikian, auditor berkewajiban memberikan saran-sarannya.
4. Rekonsiliasi laporan, merupakan rekonsiliasi secara periodik antara fisik aktiva dengan catatan-catatan atau perkiraan-perkiraan buku besar.
5. *Stock opname*, merupakan pemeriksaan secara tiba-tiba dengan maksud untuk melindungi atau mengamankan aktiva dan catatan.

6. Rancangan struktur pengendalian intern, merupakan penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain, yaitu: pemisahan tugas yang cukup otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, serta pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian intern telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik lagi.

#### **2.1.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal**

Pelaksanaan struktur pengendalian intern yang efisien dan efektif haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan.

COSO (2013:9) menjelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal sebagaimana yang dirumuskan dalam *Internal Control Integrated Framework* sebagai berikut:

*The Framework recognizes that while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity's objectives, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgment or decisions, or external events that can cause an organization to fail to achieve its operational goals. In other words, even an effective system of internal control can experience a failure. Limitations may result from the:*

1. *Suitability of objectives established as a precondition to internal control.*
2. *Reality that human judgment in decision making can be faulty and subject to bias.*
3. *Breakdowns that can occur because of human failures such as simple errors.*
4. *Ability of management to override internal control.*
5. *Ability of management, other personnel, and/or third parties to circumvent controls through collusion*

6. *External events beyond the organization's control.*

Berdasarkan uraian COSO, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengalami kegagalan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa keterbatasan-keterbatasan yang ada mungkin terjadi sebagai hasil dari penetapan tujuan-tujuan yang menjadi prasyarat untuk pengendalian internal tidak tepat, penilaian manusia dalam pengambilan keputusan yang dapat salah dan bias, faktor kesalahan/kegagalan manusia sebagai pelaksana, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian internal, kemampuan manajemen, personel lainnya, ataupun pihak ketiga untuk menghindari kolusi, dan juga peristiwa-peristiwa eksternal yang berada di luar kendali organisasi.

Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern sebagaimana dikemukakan oleh Amin Widjaja (2013:26) yaitu:

1. **Manajemen mengesampingkan pengendalianintern**, pengendalian suatu entitas mungkin dikesampingkan oleh manajemen.
2. **Kesalahan yang tidak disengaja oleh personil**, sistem pengendalian intern hanya efektif apabila personil yang menerapkan dan melaksanakan pengendalian jga efektif.
3. **Kolusi**, efektivitas pemisahan fungsi terletak pada pelaksanaan individual sendiri atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka atau pelaksanaan pekerjaan seseorang diperiksa oleh orang lan. Sering terdapat suatu resiko bahwa kolusi antara individual akan merusak efektivitas pemisahaan tugas.

Selanjutnya menurut Azhar Susanto (2013:110), ada beberapa keterbatasan dari pengendalian internal, yaitu:

1. **Kesalahan (*Error*)**, kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.
2. **Kolusi (*collusion*)**, kolusi terjadi dua atau lebih karyawan berkolaborasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja.
3. **Penyimpangan manajemen**, karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.
4. **Manfaat dan biaya**, berhubungan dengan konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkan. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang memberikan manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian tersebut.

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan sistem pengendalian yang direncanakan. Namun demikian, dalam penerapan sistem pengendalian internal diharapkan semua kemungkinan akan terjadinya kesalahan atau penyelewengan dapat dikurangi atau dicegah dan apabila terjadi, maka dengan segera diketahui penyebabnya dan segera pula di atasi.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa pengendalian intern memiliki keterbatasan yang dapat menghambat tercapainya pengendalian. Oleh karena itu pengendalian internal terutama bukanlah untuk mencari kesalahan yang ada, melainkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan sehingga dapat diketahui dan diatasi dengan cepat.

### **2.1.3 Kecurangan**

#### **2.1.3.1 Definisi Kecurangan**

Pada kenyataannya kecurangan (*fraud*) hampir terdapat di setiap lini pada organisasi, mulai dari jajaran manajemen samapai kepada jajaran pelaksana bahkan bisa sampai ke pesuruh (*office boy*). Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh pegawai yang tampaknya terlihat jujur sekalipun.

Pengertian *fraud* menurut *Standar the Institute of Intrnal Auditor 2013* dalam Diaz (2013:4), sebagai berikut:

*Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain : money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage.*

Yang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain.

Pengertian kecurangan menurut Amin Widjaja (2009:1) adalah sebagai berikut:

“Penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si penipu.”

Sedangkan *fraud* menurut Alvin Arens (2008:430) kecurangan klasik McKesson-Robbins mengilustrasikan bahwa kecurangan:

Kecurangan laporan keuangan bukanlah hal yang baru. Sebagai buntut dari skandal itu profesi auditing menanggapi dengan menetapkan standar-standar formal yang pertama untuk prosedur audit. Standar-standar tersebut mengharuskan dilakukannya konfirmasi piutang dan observasi atas persediaan fisik, yang sekarang merupakan prosedur standar, ditambah pedoman mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan.

Menurut Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:554) menjelaskan bahwa kecuragan adalah, sebagai berikut:

“*Fraud* adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan”.

Secara garis besar maka *fraud* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang disengaja dengan melakukan penipuan, penggelapan, ataupun pelanggaran kepercayaan, membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban.

### 2.1.3.2 Unsur-Unsur Kecurangan

Unsur-unsur pembentuk *fraud* haruslah lebih dipahami terlebih dahulu unsur-unsur seperti ini harus ada di dalam *fraud* sebab jika tidak ada, maka kasus *fraud* tidak lah bisa dibilang sebagai kasus *fraud* melainkan baru memasuki tahap *error*, *negligence* (kelalaian), pelanggaran etika, atau pelanggaran komitmen pelayanan. Jika tidak terdapat unsur-unsur dari kecurangaan, maka di anggap kecurangaan tidak terjadi. Adapun unsur-unsur *fraud* menurut Diaz Priantara (2013:6) sebagai berikut:

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi.
2. Bukan hanya pembuat pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum.
3. Terdapat penyalahgunaan aset atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi.
5. Didukung fakta bersifat material ( *material fact*), artinya mesti didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum.
6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (*make-knowingly or recklessly*), apabila kesengajaan itu dilakukan terhadap suatu data atau informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal itu dengan maksud (*intet* ) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau terpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data.
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah (*misrepresentation*) yang merugikan (*detriment*). Artinya ada pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat

manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau harta maupun keuntungan ekonomis lainnya.

Sedangkan menurut Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Josep T. Wells yang dikutip oleh Amin Widjaja (2005:25) kecurangan memiliki beberapa unsur diantaranya:

1. Tersembunyi.
2. Penyimpangan dari kewajiban pelakunya dengan mengorbankan organisasi.
3. Dilakukan dengan tujuan baik langsung maupun tidak langsung demi keuntungan secara financial.
4. Menjadikan kerugian bagi asset, pendapatan maupun cadangan bagi organisasi. Dimana kecurangan memiliki bentuk yang disebut segitiga kecurangan atau sering *disebut the fraud triangle* diantaranya:

**a. Perceived Pressure**

Situasi dimana seseorang menyakini bahwa mereka melakukan kecurangan karena kebutuhan, merasa perlu untuk melakukan kecurangan.

**b. Perceived Opportunity**

Situasi dimana seseorang menyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan kecurangan dan tidak terdeteksi.

**c. Rationalization**

Suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang akan melakukan kecurangan merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima.

Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:340) menjelaskan bahwa unsur-unsur kecurangan legal, ataupun penipuan seperti yang dikenal menurut hukum secara umum adalah:

1. Representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam beberapa kasus tertentu
2. Dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa memiliki cukup pengetahuan atas subjek untuk dapat memberikan sebuah representasi (sering dikenal sebagai *scienter*)
3. Seseorang yang bertindak atas representasi tersebut
4. Sehingga menimbulkan kerugian baginya.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* terjadi apabila memenuhi syarat-syarat terjadinya *fraud*. Artinya *fraud* tidak akan terjadi

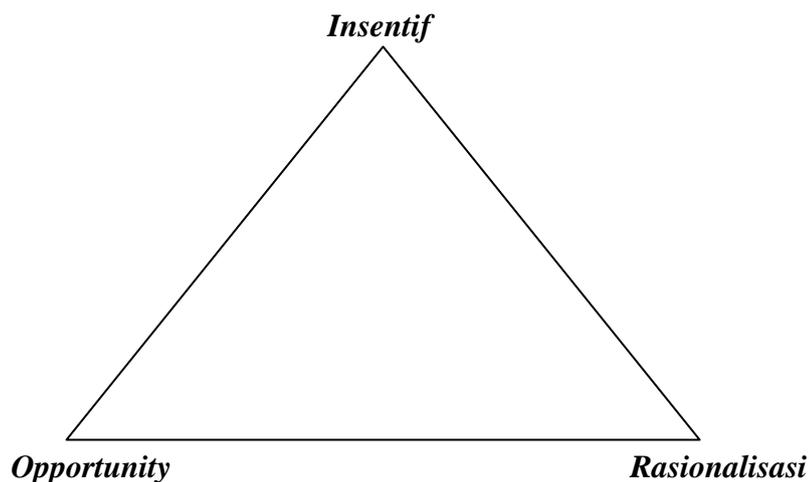
apabila tidak adanya unsur-unsur yang mendukungnya yaitu suatu representasi yang salah atas fakta material yang dilakukan dengan sengaja atas dasar pengetahuan sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian material yang sangat besar. Suatu kejadian *fraud* harus mencakup salah pernyataan dari suatu fakta yang bersifat material, yang mana kejadian tersebut adalah kejadian yang disengaja. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang disengaja, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan *fraud*.

### 2.1.3.3 Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan

*Fraud* umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor terjadinya *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Faktor-faktor terjadinya kecurangan menurut Arens (2008:432) faktor terjadinya kecurangan terbagi menjadi 3(tiga)bagian, sebagai berikut;

1. ***Insentif / Tekanan*** – Manajemen atau pegawai lain mmerasakan insetif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. ***Opportunity / Kesempatan*** – Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.
3. ***Rasionalisasi / Sikap*** – Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan tidak jujur.



**Gambar 2.2 Segitiga Kecurangan / *Fraud Triangle***  
Sumber Auditing and jasa assurance (2008:433)

Maksud dari gambar diatas dapat lebih dijelaskan sebagai berikut;

### **1. *Insentif* / Tekanan**

Insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunkan prospek keuangan perusahaan. Sebagai contoh, penurunan laba mungkin mengancam kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana pembiayaan. Perusahaan juga mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolak ukur para analis seperti laba tahun sebelumnya, untuk memenuhi batas akad utang, atau untuk secara umum menaikkan harga saham. Dalam beberapa kasus manajemen hanya akan memanipulasi laba hanya demi menjaga reputasi mereka.

### **2. *Opportunity* / Kesempatan**

Meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin saja menjadi sasaran malipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih besar. Sebagai contoh, penilaian persediaan mengandung risiko salah saji yang lebih besar bagi

perusahaan yang persediaannya tersebar di banyak lokasi. Risiko salah saji persediaan ini semakin meningkat jika persediaan itu menjadi usang.

Perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji. Banyak kasus pelaporan keuangan yang curang disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan komite audit dan dewan dewan direktur atau pelaporan keuangan.

### **3. *Rasionalisasi / Sikap***

Sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam meniai kemungkinan laporan keuangan yang curang. Jika CEO atau manajer puncak lainnya sangat tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan prakiraan yang terlalu optimistik, atau terlalu cemas mengenai pencapaian prakiraan laba yang dibuat analis, pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjad. Karakter manajemen atau serangkaian nilai-nilai etis juga mungkin mempermudah analis merasionalisasi tindakan yang curang.

Sedangkan menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:357) bahwa terdapat tiga kondisi yang ada bagi terjadinya *fraud*, yaitu:

1. Situasi akan kebutuhan.
2. Lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan.
3. Karakteristik perilaku seseorang.

Maksud dari situasi disini adalah dimana situasi ini dapat disebabkan oleh intensif atau tekanan dengan alasan keuangan karena pengeluaran atau kerugian uang lainnya yang dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari

individu tersebut. Artinya kebutuhan ini bersifat psikologis, karena adanya keinginan untuk hidup berlebih. Kemudian, yang menjadi faktor penyebab *fraud* yang kedua adalah lingkungan yang mengundang terjadinya pemggelapan. Hal ini biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol atau dimana kontrol internnya lemah, atau keadaan dimana terdapat kontrol namun tidak berfungsi. Faktor penyebab *fraud* yang ketiga adalah karakteristik perilaku seseorang. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya kedua kondisi di atas, dimana kasus-kasus *ekstrem* dan faktor pertama di atas kemudian ditambah dengan situasi kontrol yang lemah dari unsur yang kedua, jelas dapat menguasai moral dasar seseorang untuk melakukan penyelewengan.

#### **2.1.3.4 Jenis-Jenis Kecurangan**

Menurut *Association of Certified Fraud Examination* (ACFE) dalam Diaz (2013:68), kecurangan terbagi menjadi tiga bagian;

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)
2. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statment*)
3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis-jenis kecurangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)**

*Asset Misappropriation* meliputi penyalahgunaan, pemggelapan, atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak didalam dan/ atau pihak diluar perusahaan. *Fraud* jenis ini merupakan bentuk *fraud* yang klasikal dan seharusnya paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (*tagible*) atau

dapat diukur dan dihitung (*defined value*). Pengungkapan *Asset Misappropriation* dilakukan dengan mengkombinasikan teknik auditing dengan teknik investigasi. Kedua teknik tersebut memiliki porsi yang seimbang dalam penanganan kasus *Asset Misappropriation*. *Asset Misappropriation* seringkali diidentikkan sebagai *employee fraud* atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai sebab mayoritas pelaku *Asset Misappropriation* memang berada pada tingkat atau kedudukan sebagai pegawai.

## **2. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*)**

*Fraudulent Statement* seringkali diidentikkan sebagai *management fraud* atau *fraud* yang dilakukan oleh manajemen sebab mayoritas pelaku memang berada pada tingkat atau kedudukan di lini manajerial (pejabat atau eksekutif manajer senior). *Fraudulent Statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. *Fraudulent Statement* mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*, *financial shehanigans* (permainan gila finansial), *accounting gimmicks* (tipu muslihat akuntansi), *cooking the books* (memasak pembukuan), *illegal earning management* (manajemen laba yang tidak sah), *income smoothing* (perataan laba). Pengungkapan dan pendeteksian *fraudulent statement* sangat membutuhkan

kecakapan auditing dan akuntansi. Meskipun tipologi kedua ini paling banyak berkaitan dengan pelaporan keuangan yang dibuat salah atau menipu, namun sebenarnya ACFE menekankan bahwa pelaporan kinerja operasional, permohonan kredit, prospektus atau pernyataan publik (*press release*) yang dibuat untuk mengelabui orang lain guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi termasuk *fraudulent statement*.

### **3. Korupsi (*Corruption*)**

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi, *fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Termasuk didalam jenis korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/legal (*illegal gratuities*) yang lebih dikenal sebagai hadiah dan gratifikasi yang terkait dengan hubungan kerja dan jabatan, dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) atau dikenal sebagai pungutan liar atau upeti untuk mengungkap korupsi, auditor seharusnya memiliki keterampilan dan pengalaman melakukan investigasi sebab porsi teknik investigasi dalam mengungkap korupsi lebih dominan ketimbang audit.

*Conflict of interest* terjadi saat suatu pihak memiliki kepentingan ekonomis pribadi atau memiliki relasi kepentingan dengan pihak yang lain yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang memberikan kerja. Contohnya adalah penunjukan langsung pelaksana proyek oleh panitia lelang kepada orang yang dekat dengan panitia lelang tanpa memperhatikan keadilan dalam proses

pemenuhan kualifikasi, memasukkan vendor atau kontraktor “tertentu” menurut kepentingan pribadi pemilik kewenangan ke dalam daftar rekanan, pembuatan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu yang memiliki afiliasi dengan pemilik kewenangan.

### **2.1.3.5 Tanda-Tanda Kecurangan**

Kecurangan atau *fraud* dapat di ketahui melalui sinyal atau tanda-tanda yang diberikan bahwa telah terjadi tindak kecurangan dalam perusahaan. Tanda-tanda *fraud* yang disebutkan oleh Amin Widjaja (2005:61) antara lain adalah:

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan.
4. Pengendalian operasi yang tidak baik.
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan.

Pernyataan itu memberikan penjelasan bahwa *fraud* dapat dideteksi dari perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dari tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menutupi *fraud* sehingga timbul perbedaan angka. Tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas juga dapat menimbulkan *fraud* karena karyawan dapat bertindak semena-mena tanpa memperdulikan tanggung jawabnya.

Karyawan harus dirotasi karena semakin lama karyawan ditempatkan di bagian tertentu, mereka akan mengetahui banyak rahasia atau hal-hal penting yang berkaitan dengan pekerjaannya. Selain itu, pengendalian operasi harus berjalan dengan baik agar sumber daya efisiensi dan efektif.

*Fraud* biasanya muncul bersamaan dengan *red flag*. *Red flag* dapat diidefinisikan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal.

### **2.1.3.6 Pendeteksian Kecurangan**

Pada dasarnya tindak *fraud* dapat diketahui oleh sistem pengendalian internal karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak *fraud* yang mungkin terjadi, bagian pengendalian internal harus memiliki intuisi yang tajam dalam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang rawan terjadi *fraud*.

Pendeteksian kecurangan menurut Valery G Kumaat (2011:156) sebagai berikut:

Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit).

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa pendeteksian *fraud* merupakan suatu deteksi awal yang harus dilakukan agar tindak *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian.

Upaya pendeteksian ini bisa berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, tetapi harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan. Menurut Valer G Kumaat (2011:156) menyimpulkan bahwa cepat atau lambatnya pendeteksian kecurangan bergantung pada:

1. Fakto di pihak pelaku, yaitu kemampuan menyiasati sistem atau menutup celah dari praktek *fraudnya*, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindakan *fraud*.

2. Faktor yang ditentukan oleh kapasitas audit sendiri yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis resiko (*risk based audit*) dan membangun jaringan informasi (*audit intelligent*) dengan tetap bersikap hati-hati.

### 2.1.3.7 Pencegahan Kecurangan

Kasus kecuranganyang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Apabila *fraud* tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:13), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*. Pusdiklatwas BPKP (2008:38) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*
2. Prosedur pencegahan baku
3. Organisasi
4. Teknik pengendalian
5. Kepekaan terhadap *fraud*.

Adapun penjelasan dari langkah-langkah metode pencegahan kecurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*

Kebijakan unit organisasi harus memaat *a high ethical tone* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk

menjalankannya sehingga kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik.

## 2. Prosedur pencegahan baku

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu perusahaan merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengatasi *fraud*. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung. Secara umum prosedur pencegahan harus memuat:

- a. Pengendalian intern, diantaranya adalah pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi.
- b. Sistem review dan operasi yang memadai bagi sistem komputer, sehingga memungkinkan komputer tersebut untuk mendeteksi *fraud* secara otomatis. Hal-hal yang menunjang terjadinya sistem tersebut adalah:
  - Desain sistem harus mencakup fungsi pengendalian yang memadai.
  - Harus ada prinsip-prinsip pemisahan fungsi.
  - Ada *screening* (penelitian khusus) terhadap komputer dan karyawan pada saat rekrutmen dan pelatihan.
  - Adanya pengendalian atas akses dalam komputer maupun data.
- c. Adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis (*built in*) dalam sistem, mencakup:
  - Prosedur yang memadai untuk melaporkan *fraud* yang ditemukan.

- Prosedur yang memadai untuk mendeposisikan setiap individu yang terlibat *fraud*.

Memproses dan menindak setiap individu yang terlibat *fraud* secara cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal (*deterence*) yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya, jika terhadap individu yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain untuk melakukan *fraud*.

### 3. Organisasi

- a. Adanya *audit committe* yang indeoenden menjadi nilai plus.
- b. Unit audit internal mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis pengendalain intern dan tetap waspada terhadap *fraud* pada saat melaksanakan audit.
- c. Unit audit internal harus mempunyai akses ke *audit committe* maupun manajemen puncak. Walaupun pimpinan auditor internal tidak melapor ke senior manajemen puncak, akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya khusus, ia harus dapat langsung akses ke pimpinan yang lebih tinggi.
- d. Auditor internal harus mempunyai tanggung jawab yang setara dengan jajaran eksekutif, paling tidak memiliki akses yang independen terhadap unit rawan *fraud*.

#### 4. Teknik pengendalian

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya *fraud*, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi. Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan *fraud*.

- a. Pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak ada satu orang pun menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi.
- b. Pengawasan memadai
- c. Kontrol yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap data yang ditolak dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program serta media pendukung lainnya.
- d. Adanya manual pengendalian terhadap *file-file* yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer ataupun pembuangan *file (disposal)* yang sudah tidak terpakai.

#### 5. Kepekaan terhadap *fraud*

Kerugian dapat dicegah apabila perusahaan mempunyai staf yang berpengalaman dan mempunyai “SILA” (*Suspicious, Inquisitive, Logikal, and Analytical Mind*), sehingga mereka peka terhadap sinyal-sinyal *fraud*. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuh-kembangkan “SILA” adalah:

- a. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila dimungkinkan menggunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah berkerja sama dengan mereka.
- b. Implementasi prosedur curah pendapat yang efektif, sehingga para pegawai yang tidak puas mempunyai jalur untuk mengajurkan protesnya. Dengan demikian, para karyawan merasa diperhatikan dan mengurangi kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi.
- c. Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi atau kerugian pegawai lainnya yang mencurigakan. Rasa curiga yang beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan harus ditimbulkan. Untuk itu perlu dijaga kerahasiaan sumber-sumber/orang yang melaporkan. Dari pengalaman yang ada terlihat bahwa *fraud* biasanya diketahui berdasarkan laporan informal dan kecurigaan dari sesama kolega.
- d. Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin tanpa pengawasan yang memadai. Bahkan di beberapa perusahaan Amerika Serikat, lembur dianggap sebagai indikasi ketidakefisienan kerja sebanyak mungkin harus dikurangi/dihindari. Dengan penjadwalan dan pembagian kerja yang baik, semua pekerjaan dapat diselesaikan pada jam-jam kerja.
- e. Karyawan diwajibkan cuti tahunan setiap tahun. Biasanya pelaku *fraud* memanipulasi sistem tertentu untuk menutupi perbuatannya. Hal

ini dapat terungkap pada saat yang bersangkutan mengambil cuti tahunannya, dan tugas-tugasnya diambil alih oleh karyawan lain. Bila mungkin, lakukan rotasi pegawai periodik untuk tujuan yang sama.

Menurut Pusdiklatwas BPKP(2008:37), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud*, karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi secara cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

#### **2.1.3.8 Tujuan Pencegahan Kecurangan**

Adanya penerapan *Good Corporate Governance* membuat sejumlah perusahaan baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan *fraud*. Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada bagaian pengendalian intern untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* yang mungkin terjadi didalam lingkungan perusahaan. Apabila teknik pencegahan *fraud* berjalan dengan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya kepercayaan publik terhadap perusahaan.

*Fraud* merupakan masalah yang ada didalam lingkungan perusahaan, dan harus dicegah sedini mungkin. Pencegahan *fraud* yang efektif memiliki lima tujuan, menurut Diaz (2013:183) adalah sebagai berikut:

1. **Prevention**– mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi
2. **Deterrence** – menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko *fraud* efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga membantu jera (takut) pelaku potensial.
3. **Disruption** – mempersulit gerak langkah pelaku *farud* sejauh mungkin
4. **Identification** – mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian
5. **Civil action prosecution** – melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.

Sedangkan pencegahan kecurangan menurut Amin Widjaja Tunggal (2005:33), yaitu:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu
2. Proses rekrutmen yang jujur
3. Pelatihan *fraud awarenss*
4. Lingkup kerja yang positif
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati
6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Adapun penjelasan dari tata keloloa pencegahan *fraud* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu

Riset menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk

mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota organisasi atau perusahaan.

Keterbukaan antar anggota organisasi merupakan hal yang sangat pokok yang harus dimiliki setiap perusahaan dan penting yang berguna untuk perkembangan serta perilaku SDM yang kompeten dan manajemen profesi yang adaptif, yaitu merupakan sikap tanggap terhadap perusahaan yang terjadi yang diikuti dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping adanya kejujuran dan keterbukaan, keberhasilan perusahaan dalam mencegah kecurangan tidaklah ditentukan oleh hasil kerja individu melainkan atas keberhasilan tim (kerja sama). Suatu organisasi dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh sekelompok orang yang membentuk atau menjadi anggota dalam organisasi, dalam kenyataan berfungsi sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial orang-orang tersebut terkait dalam lingkungan masyarakat dan berarti mereka saling berhubungan, saling mempengaruhi satu sama lain, dan saling membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Bayu Dwi (2002).

## 2. Proses Rekrutmen yang jujur

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-

orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan diperkerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab. Pengecekan latar belakang memverifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Pelatihan secara rutin untuk seluruh pegawai mengenai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku, dalam review kinerja reguler termasuk diantaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, dan selalu melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku, dan setiap pelanggaran ditangani segera.

### 3. Pelatihan *fraud awereness*.

Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Menurut Amin Widjaja pelatihan *fraud awereness* (2008:83), sebagai berikut:

“Keahlian yang diberikan dalam organisasi untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan karir karyawannya, termasuk semua tingkatan karyawan, baik sumber daya internal maupun eksternal.”

Pelatihan tersebut bermaksud untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang

disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut merupakan serangkaian pelatihan yang perlu diperhatikan dan diterapkan pada setiap karyawan di perusahaan secara eksplisit agar dapat mengadopsi harapan-harapan yang baik untuk perusahaan, diantaranya:

1. Kewajiban-kewajiban mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu yang dihadapi.
2. Membuat daftar jenis-jenis masalah
3. Bagaimana mengkomunikasikan masalah-masalah tersebut dan adanya kepastian dari manajemen mengenai harapan tersebut.
4. Lingkup kerja yang positif.

Dari beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Pengakuan dan sistem penghargaan (*reward*) sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi semua pegawai, program kompensasi secara profesional, pelatihan secara profesional dan prioritas organisasi dalam pengembangan karir akan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan positif. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat kerja pegawai, yang dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam

suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dan kode etik di lingkungan pegawai. Harus di buat kriteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku jujur dan tidak jujur, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semua ketentuan ini dibuat secara tertulis dan diinternalisasikan (disosialisasikan) ke seluruh karyawan dan harus mereka setuju dengan membubuhkan tanda tangannya. Pelanggaran atas aturan perilaku kode etik harus dikenakan sanksi.

6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan.

Masalah ataupun kesulitan pasti akan dialami oleh setiap pegawai atau karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah yang dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang ada, penyimpangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Bentuk perhatian dan bantuan tersebut sebaiknya dapat diberikan kepada pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta penyelewengan terhadap keuangan perusahaan, serta menjadi dukungan dan solusi dalam menghadapi permasalahan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap kecurangan.

7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal.

Strategi pencegahan kecurangan yang terakhir yaitu dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar

menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan suatu peraturan terhadap setiap tindak kecurangan yang ada sehingga, perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir, dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan tindakan curang.

Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersama-sama pada setiap anggota organisasi perusahaan guna mensejahterakan suatu perusahaan, karena apabila suatu perusahaan dapat berkembang dan maju kerah lebih baik, maka sejahtera pula seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Serta apabila seluruh bagian karyawan dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, maka dapat melatih pula moral, etika, serta teladam yang baik pada jiwa setiap karyawan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu mengenai kualitas sistem informasi akuntansi berkaitan dengan pengendalian internal dan pengendalian internal berkaitan dengan pencegahan kecurangan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Meida Maryana (2013)	Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Pengendalian Internal	Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal. Artinya dengan semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi akan meningkatkan pengendalian intern pada perusahaan.
2	Sajady (2008)	<i>Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information</i>	Implementasi sistem informasi akuntansi pada perusahaan menyebabkan peningkatan para manajer dalam pengambilan keputusan, pengawasan intern dan mutu laporan keuangan yang memudahkan proses transaksi perusahaan.
3	Lisa Amelia (2013)	Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan	Sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecurangan. Semakin baik penerapan sistem pengendalian intern maka semakin rendah tindakan kecurangan pada perusahaan tersebut.
4	I Made Darma Prawira (2014)	Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektifitas Pengendalian Intern terhadap Kecenderungan Kecurangan	Efektifitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Jika efektifitas pengendalian internal semakin meningkat, bisa menurunkan kecenderungan kecurangan.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

### **2.3.1 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Internal Berbasis COSO**

Organisasi menggantungkan diri pada sistem informasi untuk dapat berdaya saing. Produktivitas sebagai faktor yang penting untuk mempertahankan daya saing perusahaan dapat ditingkatkan dengan sistem informasi yang baik. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang benar maka manajemen dalam organisasi perusahaan dapat mengevaluasi hasil dari suatu operasi atau suatu kegiatan apakah berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem informasi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pengguna baik di dalam (internal) maupun di luar (eksternal) perusahaan. Sistem informasi akuntansi (SIA) dapat juga digunakan sebagai pedoman dalam penugasan dan wewenang bagi sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai prosedur.

Sistem informasi akuntansi itu sendiri menurut Azhar Susanto (2013:72) didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi juga susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasi data keuangan menjadi informasi keuangan.

(Wijayanto dalam Mardi (2011:10). Selain itu, sistem informasi diharapkan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Untuk itu, suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian.

Sistem informasi akuntansi memiliki peranan yang cukup penting dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi dalam perkembangannya harus selalu mendapatkan pengawasan dan pengendalian intern yang ketat, karena setiap informasi yang dihasilkan akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu sistem informasi akuntansi mendapatkan pengawasan dalam setiap kegiatan perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai prosedur atau tidak, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dan memadai.

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pada pihak pemegang saham maupun masyarakat. COSO mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian intern yang efektif. Pada edisi terbaru ini, COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal *“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable*

*assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance*". Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi (2001 : 163). Hal lain dikemukakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Berdasarkan defnisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan.

Penelitian ini akan difokuskan untuk melihat sejauh mana kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas operasi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan sistem informasi akuntansi yang dirasa penting untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya, serta kegiatan aktivitas yang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta sejalan dengan peraturan yang telah

digariskan oleh pengendalian intern yang telah menentukan semua aturan yang berlaku pada perusahaan.

Menurut Krismiaji (2010:4) menyatakan bahwa ada hubungan antara kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian intern sebagai berikut:

“Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.”

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2008:19) adalah sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem yang sudah ada, baik mengenai suatu ketepatan penggajian maupun struktur informasinya.
3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan juga untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kekayaan perusahaan.
4. Mengurangi biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi.”

Adapun fungsi utama sistem informasi akuntansi menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001: 37) adalah sebagai berikut:

1. “Untuk meningkatkan kualitas informasi  
Yaitu informasi yang tepat guna (*relevance*), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.
2. Untuk meningkatkan kualitas *internal cek* atau sistem pengendalian *intern*  
Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian *intern* (*internal cek*).
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha  
Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dan harus juga lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi.”

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi sangat berperan penting dalam pengendalian intern perusahaan, segala bentuk informasi yang dikeluarkan oleh sistem informasi akuntansi memiliki nilai yang sangat berarti untuk keberlangsungan hidup perusahaan, sistem informasi akuntansi memberikan informasi secara menyeluruh kepada semua pihak yang memerlukan informasi tersebut.

### **2.3.2 Pengaruh Pengendalian Internal Berbasis COSO terhadap Pencegahan Kecurangan**

Dalam perusahaan yang semakin berkembang, pembentukan struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Struktur organisasi yang baik harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi antara departemen, sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan atau penyimpangan, karena walaupun pengendalian intern yang baik telah dirancang dan ditetapkan tetapi bukan berarti pengendalian intern telah ditaati. Pengendalian intern merupakan rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen Wing Wahyu Winarno(2006:11.4).

Pengendalian intern tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi. Namun pengendalian intern diharapkan mampu mendeteksi indikasi terjadinya kecurangan di dalam perusahaan dan dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan dan dalam pengambilan suatu keputusan. Melalui pengendalian, kecurangan dapat dipecahkan dan dideteksi sedini mungkin oleh pihak manajemen. Pengendalian

intern yang baik akan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Sebaliknya pengendalian intern yang lemah akan memberikan peluang kepada pegawai maupun manajemen untuk bertindak curang.

Pengendalian intern merupakan bagian terpenting bagi suatu organisasi perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk mencapai efisiensi kerja ini, salah satu alat pengukurnya adalah mencegah dan mengatasi kecurangan. Dimana untuk mencegah dan mengatasi kecurang itu di perlukan pengendalian intern.

Pengertian *fraud* adalah bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan *farud*. *Fraud* sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti ketidak jujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material Amin Widjaja (2012:2).

Tindakan *fraud* dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab dari pihak manajemen, serta adanya pengawasan oleh komite audit perusahaan. Pencegahan *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP(2008:37) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenara atau rasionalisasi atas tindakan fraud yang dilakukan.

Untuk menangani masalah kecurangan ini, diperlukan monitoring. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik diperlukan pengendalian intern yang memadai. Pengendalian intern yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, dan persaingan.

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya fraud karena setiap tindakan fraud dapat terdeteksi dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan fraud yang dapat merugikan banyak pihak.

Penelitian ini akan difokuskan untuk melihat sejauh mana pengaruh pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas operasi perusahaan terhadap tindak pencegahan kecurangan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan pengendalian intern yang dirasa penting untuk mengawasi, mengendalikan aktivitas yang terjadi didalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan resiko kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau pun karyawan.

Lisa Amelia (2013) melakukan pengujian untuk mengukur sejauh mana pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan, semakin baik penerapan sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam organisasi perusahaan maka akan semakin menekan rendah tingkat tindakan kecurangan yang akan terjadi pada perusahaan tersebut.

I Made Darma Prawira (2014) melakukan pengujian untuk mengukur sejauh mana pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan. Hasil penelitian

menunjukkan pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan. Jika efektifitas pengendalian semakin tinggi maka dapat menurunkan kecenderungan kecurangan, namun jika pengendalian intern yang diterapkan tidak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan maka tingkat kecurangan akan semakin tinggi.

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:70) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengendalian intern terhadap kecurangan adalah:

Pengendalian intern diharapkan dapat melindungi kekayaan perusahaan yang diakibatkan dari pencurian, penggelapan uang oleh karyawan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva perusahaan di lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya.

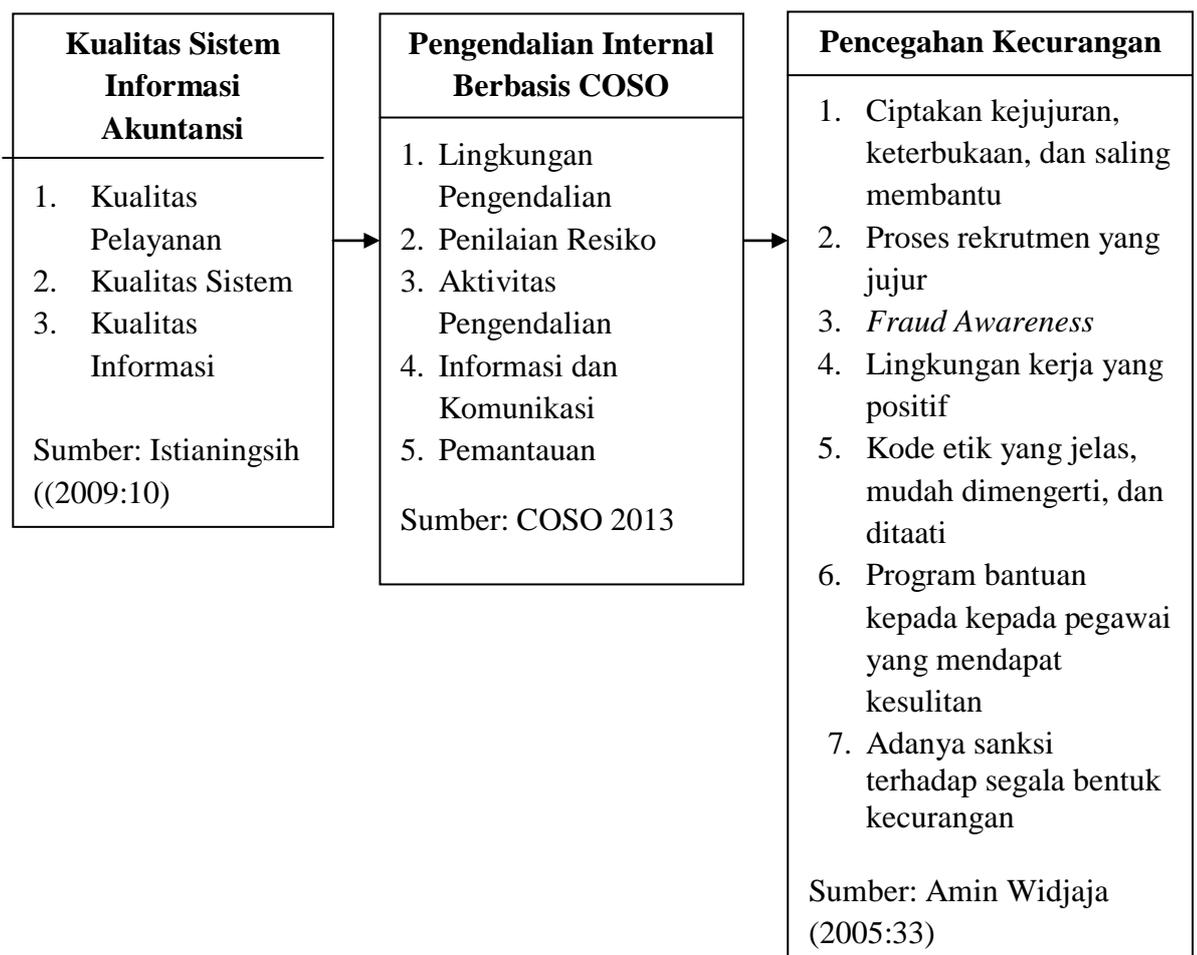
Kemudian Azhar Susanto (2013:93) pun memberikan pendapat tentang pandangannya terkait pengendalian intern terhadap kecurangan, yaitu:

Sistem pengendalian intern yang komprehensif, diterapkan secara menyeluruh dan memonitor secara reguler aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga dan mendeteksi resiko kerugian yang diakibatkan oleh penyelewangan dibidang keuangan. Pengendalian intern sangat penting dalam mendeteksi adanya penyelewangan keuangan yang berisiko merugikan perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan didalam perusahaan maka tindak kecurangan dalam perusahaan dapat diminimalkan. Walaupun pengendalian intern tidak dapat mencegah seluruh tindak kecurangan, namun pengendalian intern mampu untuk menekan dan mendeteksi tindakan kecurangan yang terjadi di perusahaan.

### 2.3.3 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan keterkaitan antara variabel kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal berbasis COSO dan dampaknya pada pencegahan kecurangan, maka dapat dirumuskan paradigma mengenai pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal berbasis COSO dan dampaknya pada pencegahan kecurangan seperti berikut:



**Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Pengendalian Internal Berbasis COSO.
- H2: Pengendalian Internal Berbasis COSO berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan.